



BUMN/Lembaga di Bawah Kemenkeu Setorkan Dividen Rp3,1 Triliun dan Pajak Rp7,3 Triliun Kepada Pemerintah

Jakarta, 2 Juli 2021 – Pemerintah, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melakukan investasi jangka panjang permanen kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Lembaga lainnya. Hingga tahun 2020, investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah sebesar Rp3.031 triliun (LKPP Tahun 2020 *Audited*), termasuk di dalamnya Investasi Permanen Pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp82,1 triliun.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020), BUMN/Lembaga tersebut menyetorkan dividen kepada Pemerintah sebesar Rp3,1 triliun dan pajak sebesar Rp7,3 triliun. Selain itu hingga tahun 2020, BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan telah melaksanakan mandat Pemerintah dalam pembiayaan di sektor infrastruktur dengan total nilai komitmen sebesar Rp117 triliun (total nilai proyek sebesar Rp699 triliun dari 292 proyek yang telah berjalan), memberikan penjaminan kepada pelaku usaha di sektor infrastruktur sebesar Rp66,4 triliun dengan nilai proyek Rp315 triliun, mengembangkan sektor ekspor dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan nilai *outstanding* pembiayaan sebesar Rp90,4 triliun (nilai ekspor sebesar Rp315 triliun), memberikan pembiayaan perumahan sebesar Rp69,15 triliun kepada 1.083.590 debitur, dan memberikan pinjaman kepada 28 Pemerintah Daerah dalam rangka membangun 38 fasilitas publik.

Sedangkan perannya dalam mendukung proyek strategis nasional, hingga saat ini tercatat BUMN/lembaga tersebut meningkatkan infrastruktur jalan dan jalan tol sepanjang 3.200,8 km, penambahan 80 kereta listrik dan revitalisasi 438 gerbong kereta, mendukung proyek 52 ribu menara telekomunikasi, dan meningkatkan jaringan serat optik sepanjang 12.148 km di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut membantu meningkatkan penyediaan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, antara lain mampu melayani sebanyak 76 juta pengguna jasa telekomunikasi di seluruh Indonesia, menyediakan fasilitas kesehatan bagi 720 pasien baru per tahun dengan tambahan fasilitas 1.786 tempat tidur baru, meningkatkan kapasitas penumpang transportasi perkotaan menjadi 7,3 juta per tahun, menambah kapasitas 37,5 juta penumpang bandara per tahun, meningkatkan arus barang

Hal 1/2

Narahubung Media:

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
Direktur Hukum dan Humas
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

☎ 0811-1620-991
☎ 150 991 (call center DJKN)



pelabuhan menjadi 2,52 juta TEUs per tahun, dan membantu pengairan kepada 185 ribu hektar area sawah.

Manfaat sosial ekonomi lainnya yang telah diberikan oleh BUMN/lembaga tersebut antara lain penambahan kapasitas tenaga listrik sebesar 2481 MW, penambahan produksi air bersih sejumlah 16.890 l/s, penambahan 31.000 bpd produksi BBM, dan peningkatan kapasitas persediaan gas sebesar 10.000 MT. Upaya tersebut membantu memberikan akses yang lebih baik terhadap jaringan listrik kepada 2,76 juta rumah tangga (11,03 juta jiwa), kontribusi akses air bersih kepada 2,4 juta rumah (9,7 juta jiwa), dan jaringan gas alam kepada 21.000 rumah tangga.

Sebagai informasi, secara umum PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dalam rangka menjalankan mandat Pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna terus mengupayakan peran BUMN/lembaga sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Beberapa bantuan atau kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) yang telah dilakukan oleh BUMN/lembaga di bawah Kemenkeu kepada masyarakat diantaranya pemberian bantuan penyemprotan disinfektan dan APD-Masker kepada Klinik dan Faskes di lingkungan perusahaan, penyediaan wastafel portabel di sejumlah tempat, bantuan operasional kepada pondok pesantren dan program tas bakti untuk guru, penyelenggaraan program Desa Kakao Devisa (sejak 2012) untuk 609 petani kakao Koperasi Kerta Semaya Samaniya dan membantu 3 kluster UMKM pada Koperasi Apikiri di sektor produksi *Eco Coffin* (peti mati ramah lingkungan) untuk membantu pengembangan daya saing komoditas ekspor. (*)

Narahubung Media: _____

Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
Direktur Hukum dan Humas
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

☎ 0811-1620-991
☎ 150 991 (call center DJKN)